**MEMPERJUANGKAN RUANG NEGOSIASI MELALUI PRODUKSI TEKS**

(ANALISIS WACANA KRITIS: WACANA KONFLIK DALAM MEDIA DIGITAL FORBALI.ORG)

**Nyoman Ayu Sukma Pramestisari1**

**1Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana**

**Email: allgtr.asp@gmail.com1**

**Abstrak**

The plan to build the Benoa Bay reclamation mega project to support Bali's tourism industry. Ironically, the construction of reclamation has become a matter of controversy in the community because there have been various rejections through the ForBALI alliance. This can be seen from the production of the text of the article on the ForBALI.org page presenting the discourse of conflict between the counter-reclamation community and the government as a policy supporter as an oligarchy. Through the production of this text, periodical discourse is presented as well as reporting each case in detail along with an analysis of the critical dimensions of the counter-discourse community as resource persons, which are important points in attracting the sympathy of text consumers. Moreover, the sources in the text often have strong legitimacy because of their strategic position in society.

Keyword: Negotiation Arena, Text Production, Benoa Bay Reclamation

**Pendahuluan**

 Wacana pariwisata Bali nampak selalu menarik untuk dibahas. Daya tarik Bali sebagai daerah pariwisata tidak semata keindahan bentang alam namun lebih pada karakteristik masyarakat yang secara teguh memegang nilai tradisional. Interseksi identitas masyarakat Bali sebagai masyarakat global dengan terpaan modernisasi sekaligus mempertahankan tradisi kearifan lokal dapat dikatakan sebagai komoditas pariwisata paling menarik (Arcana, 2007). Menjadi menarik ketika apabila wacana tersebut dikontekskan dengan perkembangan industri pariwisata dan masyarakat Bali hari ini, seolah mendesak dunia untuk mengkaji ulang balutan indah Bali dalam retorika sebagai komoditas.

 Perkembangan industri pariwisata di era orde baru tahun 70-an berimplikasi pada menjamurnya pembangunan dan pengembangan akomodasi penunjang pariwisata seperti hotel, vila, wisata buatan dan sebagainya. Kondisi ini juga diikuti dengan komodifikasi dalam aspek sosial budaya Bali, misalnya tarian sakral yang bertransformasi memenuhi kebutuhan turis (Suryadana, 2013). Apabila dipetakan maka pengembangan industri pariwisata Bali sejak tahun 1990 terpusat di area Bali selatan seperti Jimbaran, Nusa Dua, Canggu, Kuta dan lain sebagainya. Pengembangan dengan tendensi sentralisasi ini pada masanya justru mencapai titik jenuh akibat kepadatan turisme. Kepadatan ini diperkuat melalui data bahwa pada tahun 2016 terdapat sejumlah 1733 hotel di daerah Bali dengan komposisi 50% berada di daerah Kota Badung (BPS, 2016).

 Menyoal kepadatan tersebut serta prospek Bali dalam pengembangan pariwisata mengakibatkan di tahun 2012 lahir wacana Reklamasi Teluk Benoa didukung penerbitan Perpres No 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perpres No 45 Thn 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA, yang mengubah status konservasi Teluk Benoa menjadi zona penyangga atau kawasan pemanfaatan umum. Di dalam beberapa kesempatan secara umum disampaikan oleh pemerintah daerah maupun pusat bahwa reklamasi ialah alternatif solusi atas kepadatan Bali Selatan.

Kurang lebih reklamasi akan dilakukan seluas 700 hektare dengan mengurug area teluk Benoa yang dulunya merupakan lahan konservasi dan dijalankan oleh pihak Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) (ForBALI, Mengapa Kami Menolak, 2013). Dalam wacananya daerah ini akan dimanfaatkan untuk pertokoan tepi laut, kawasan hunian dan hotel mangrove*,* kawasan olahraga air, kawasan taman botanika*,* kawasan kultur dan pusat belanja. Mega proyek reklamasi Teluk Benoa dalam konteks ini menjadi refleksi bagaimana program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dijalankan guna mengejar pertumbuhan ekonomi Indonesia, salah satunya melalui kerjasama dengan investor atau penanam modal.

 Balutan wacana meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Bali melalui reklamasi Teluk Benoa justru mendapat resistensi dari berbagai kelompok masyarakat bahkan terorganisasi dalam organisasi masyarakat sipil bernama ForBALI. Massifnya penolakan dari ormas ForBALI dapat dilihat secara konkrit melalui aksi demonstrasi, pemasangan spanduk serta penyebaran berita melalui media digital. Dinamika aktivitas dapat dikatakan aktif konstan karena diberbagai kesempatan ForBALI hadir menyuarakan aspirasi penolakan reklamasi Teluk Benoa dengan berbagai argumentasi. Eksistensi ForBALI akhirnya mendorong penulis untuk menganalisis lebih jauh terkait wacana reklamasi Teluk Benoa terkhusus upaya penolakan dari aliansi organisasi masyarakat sipil melalui berbagai pergerakan yang terdokumentasi dan terpublikasi di berbagai media. Praktik membongkar wacana ini akan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis milik Norman Fairclough baik dalam konteks metode maupun pisau analisis. Disamping itu, tulisan ini akan didukung oleh berbagai literatur terkait sehingga menghasilkan analisis yang kritis dan mendalam.

**BALI TOLAK REKLAMASI: Sebuah Kontra Wacana**

 Paradoks pembangunan Reklamasi Teluk Benoa dalam realitanya nampak sarat akan kepentingan. Gerakan masyarakat menunjukkan hidupnya kultur demokrasi Indonesia yang memberikan ruang aspirasi bagi masyarakat sipil sekaligus resistensi masyarakat atas indikasi penyelewengan kekuasaan dalam proses pembangunan (Jones, 2015). Dinamika terkait reklamasi menjadi mudah untuk disebarkan dan diakses melalui berbagai media khususnya media digital. Salah satunya adalah media digital ForBALI yang khusus membahas mengenai seluk beluk reklamasi Teluk Benoa dan perkembangannya.

 Situs resmi organisasi masyarakat sipil ForBALI memuat beragam permasalahan reklamasi Teluk Benoa dengan spesifikasi persoalan lebih detail disetiap sajiannya. Misalnya pada tahun 2019 telah terbit 19 artikel pada website resmi ForBALI.org salah satunya adalah “Jokowi Datang, Baliho BTR Dilepas Paksa” rilis pada tanggal 14 Juni 2019 dan “Marah! ForBALI Kunci Balik Gedung DPRD Bali” rilis pada tanggal 11 April 2019. Kedua artikel nampak menggambarkan bagaimana ruang negosiasi belum mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Sebelum penulis mengarahkan tulisan pada elaborasi artikel menggunakan analisis wacana kritis Fairclough, penting untuk disajikan secara ringkas terkait poin bahasan umum guna memberikan bayangan pada pembaca terkait konteks bahasan di artikel tersebut.

 Pada artikel “Jokowi Datang, Baliho BTR Dilepas Paksa” secara umum memaparkan terjadi penurunan baliho Bali Tolak Reklamasi oleh aparat keamanan setempat pada tanggal 13 Juni 2019 sehari sebelum presiden Joko Widodo berkunjung ke Bali (ForBALI, 2019). Baliho sasaran penurunan berlokasi di daerah Gianyar yang didirikan oleh Forum Pemuda Sidan. Proses negosiasi aparat keamanan ditolak oleh pemuda setempat namun pukul 22.00 WIB diturunkan oleh orang tidak dikenal. Susanto mewakili pemuda menyatakan bahwa kasus penurunan baliho menunjukkan pemberangusan aspirasi masyarakat. Sedangkan Gendo sebagai kordinator umum ForBALI melihat penurunan baliho sebagai suatu yang lumrah sejak rezim SBY, khusus untuk kasus 13 Juni terdapat indikasi untuk menutupi aspirasi masyarakat dari presiden yang akan melewati jalur tempat baliho terpasang dalam kunjungannya pada tanggal 14 Juni.

 Berbeda fokus dengan artikel pertama, “Marah! ForBALI Kunci Balik Gedung DPRD Bali” menjelaskan demonstrasi tanggal 10 April 2019 dilakukan akibat laporan Untung Pratama sebagai Direktur WALHI Bali menyampaikan bahwa dalam rapat penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KLHS RZWP3K) terdapat upaya memperluas bandara seluas 83 hektar yang mengambil sebagian wilayah konservasi (ForBALI, 2019). Bagi Gendo dengan melakukan perluasan sejumlah tersebut justru akan menggagalkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim. Bertolak dengan permasalahan tersebut maka aksi demonstrasi diluncurkan namun tidak mendapat tanggapan khususnya dari Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama. Akhirnya massa demonstran menggembok gerbang DPRD Bali sebagai simbol diamnya lembaga perwakilan rakyat.

 Paparan singkat terkait isi artikel tersebut menunjukkan persamaan secara garis umum dan beberapa perbedaan yang menguatkan indikasi dominasi satu sama lain. Maka dari itu, refleksi penulis sebagai konsumen atas sajian teks bermuara pada bagaimana masyarakat sipil berupaya menghadirkan ruang negosiasi yang lebih demokratis atas ketimpangan relasi kuasa dalam konteks pembangunan reklamasi Teluk Benoa. Kondisi ini menjadikan relevan apabila teks atau wacana di atas dielaborasi menggunakan Analisis Wacana Kritis Fairclough dengan mengedepankan tiga aspek yaitu fungsi, praktik wacana dan aspek sosial budaya (Munfarida, 2014). Pertama, aspek fungsi teks meliputi representasi, relasi dan identitas. Kedua, aspek praktik wacana meliputi produksi dan konsumsi teks. Ketiga, aspek praktik sosial budaya dengan mengedepankan situasi, institusi dan tingkat sosial teks. Dengan kata lain ketiga aspek ini meliputi pengkajian teks, produksi teks dan praktik sosial budaya dalam kasus konflik yang disajikan oleh ForBALI.org dengan judul “Jokowi Datang, Baliho BTR Dilepas Paksa” dan “Marah! ForBALI Kunci Balik Gedung DPRD Bali”.

**Membongkar Ketimpangan Relasi Kuasa: Analisis Elaboratif Norman dengan Reklamasi Teluk Benoa**

 Dalam perspektif analisis wacana kritis, kajian terhadap teks tidak saja dilihat melalui struktur kalimat semata melainkan posisi bahasa yang tidak netral. Bahasa dapat digunakan untuk tujuan tertentu sehingga dalam memahami teks secara holistis dalam konteks kekuasaan yang implisit dapat dilakukan dengan kajian kritis Norman Fairclough terkait analisis wacana. Fairclough menegaskan posisi bahasa dalam teks menjadi praktik ideologi tertentu sehingga teks akan mengarah pada tujuan dari latar belakang perspektif yang digunakan (Darma, 2014). Ketika produksi teks mampu menghegemoni konsumen maka logika ideologi tertentu akan menjadi siklus akibat tereproduksinya wacana melalui internalisasi ideologi. Dalam dua artikel terbitan ForBALI.org, pendekatan Fairclough akan digunakan untuk menganalisa merujuk pada tiga konsep utama yaitu analisis mikro (representasi, relasi dan identitas), analisis meso (produksi, distribusi dan konsumsi teks) dan analisis makro (situasi, institusi dan kondisi sosial).

 *Pertama*, dalam analisis mikro dikedepankan aspek representasi, relasi dan identitas. Ketika mencermati dua artikel ForBALI, *aspek representa*si kental terasa pada konteks wacana konflik dengan menggambarkan aksi aliansi ForBALI dalam menolak upaya reklamasi Teluk Benoa. Kedua teks menjelaskan secara detail proses resistensi dalam dua kasus terakhir yaitu pelepasan paksa baliho oleh aparat dan penggembokan gedung DPRD Bali karena tidak merespon demonstran. Sajian berita juga lengkap menjelaskan latar belakang mereka melakukan aksi protes dikarenakan tidak mumpuninya ruang negosiasi dan praktik dominasi pemerintah terhadap gerakan sosial masyarakat.

 Dengan menghadirkan seluruh narasumber dari pihak kontra wacana reklamasi, posisi media digital ForBALI memperlihatkan keberpihakan secara gamblang pada aliansi masyarakat kontra reklamasi. Hal ini juga didukung dengan hadirnya aktor-aktor penolak reklamasi seperti Gendo, Pemuda Sidan dan Direktur Walhi. Pemerintah digambarkan sebagai oposisi otoriter, memberangus aspirasi, tidak konsisten dan memihak kepada investor dalam pembangunan reklamasi Teluk Benoa (ForBALI, 2019). Kritik terhadap pemerintah terus dipaparkan sebagai upaya delegitimasi pemerintah dalam dominasi praktik reklamasi.

 *Aspek relasi* diperlihatkan melalui wacana dalam teks terkait proses resistensi masyarakat terhadap proyek reklamasi Teluk Benoa yang tidak mendapatkan perhatian dari para pemangku jabatan, justru ditiadakan. Pada berita misalnya disajikan penurunan paksa baliho Bali Tolak Reklamasi di daerah Gianyar padahal pemuda setempat menolak upaya tersebut. Selain tindakan paksa, dijelaskan pula aksi demo berujung pada penggembokan gedung DPRD sebagai bentuk protes masyarakat atas rapat KLHS RZWP3K yang senyatanya mendukung reklamasi di wilayah konservasi, namun pemerintah justru bungkam atas aksi tersebut. Hal ini dirasa sebagai bagaimana penerapan sistem demokrasi semu akibat tidak melibatkan masyarakat terdampak dalam menentukan kebijakan.

 *Aspek identitas* sesungguhnya telah terlihat ketika memaparkan dua aspek sebelumnya. Media digital ForBALI.org di dua artikelnya memproduksi wacana konflik tolak reklamasi antara masyarakat dan pemerintah. Artikel tersebut berupaya menggambarkan situasi, kondisi, latar dan peristiwa yang condong berdiri pada posisi masyarakat kontra reklamasi. Balutan informasi pada artikel hanya memperlihatkan sudut pandang pihak kontra sebagai korban dalam kejadian tersebut. Dalam kasus penurunan baliho misalnya, perspektif oknum pelepasan baliho tidak dihadirkan melainkan hanya perwakilan pemuda Sakidan dan Gendo (kordinator ForBALI). Serupa, dalam berita penggembokan gedung DPRD hanya menghadirkan perspektif direktur WALHI dan Gendo tanpa klarifikasi pihak pemerintah. Pola pada kedua berita ini memiliki pesan yang ingin disampaikan serupa bahwa pecahnya konflik antara pemerintah dan masyarakat akibat dominasi pemangku kebijakan yang berujung gerakan sosial telah lumrah terjadi dalam wajah pembangunan Indonesia.

 *Kedua,* dalam analisis meso meliputi praktik produksi teks, distribusi teks dan konsumsi teks. Kedua artikel kajian merupakan produksi media digital ForBALI yang termuat dalam situs web resmi ForBALI.org. Apabila dikomparasikan dengan media lain, ForBALI.org sebagai wadah khusus membahas reklamasi Teluk Benoa selalu konstan aktif menghadirkan berita terbaru terkait isu reklamasi. Spirit emansipatoris sangat kental terasa jika melihat kedua teks kajian termasuk menegaskan *standing position* menolak upaya pembangunan di wilayah konservasi. Media digital menjadi solusi tepat di era kontemporer dalam menyebarkan informasi karena mampu mereduksi berbagai batas ruang dan waktu. Ketika pemaparan sebelumnya telah mampu membuktikan posisi produsen memihak masyarakat kontra wacana, maka media digital menjadi sebuah instrumen mempublikasi informasi berdasarkan perspektif produsen. Pangsa media digital yang mampu diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun menjadikan probabilitas konsumen terpapar wacana teks lebih signifikan (Badara, 2012). Maka dari itu, sasaran konsumen atas dua teks terkait isu reklamasi tidak memiliki target tertentu melainkan khalayak umum. Ketika informasi melalui legitimasi bahasa dalam teks tersebut mampu terinternalisasi pada konsumen, maka dapat dipastikan produksi wacana telah berhasil mencapai visi mereka, yaitu memperkuat basis kontra reklamasi Teluk Benoa.

 *Ketiga*, analisis makro meliputi analisis praktik sosial budaya yang merupakan interpretasi dari praktik produksi teks. Penekanan terletak pada setiap teks dalam wacana dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik (kekuasaan dan ideologi) serta budaya (nilai dan identitas) sehingga memengaruhi media yang mempublikasikan (Anas & Fitriawan, 2018). Praktik sosial budaya dalam ranah ini dapat dipahami melalui tiga pendekatan yaitu situasi institusi dan tingkat sosial. *Aspek situasi* menunjukkan media digital ForBALI mengangkat dua artikel tersebut selain karena menguatkan isu penolakan reklamasi tetapi terdapat faktor spesifik dari kejadian tersebut.

Pada kasus penurunan baliho bermula dari upaya dari oknum tertentu bernegosiasi agar baliho tolak reklamasi pemuda Sidan dilepas namun tanpa penjelasan apapun. Hal ini dikaitkan dengan upaya penutupan isu pada presiden mengingat kunjungan presiden tepat sehari setelah penurunan paksa melewati daerah dimana baliho terpasang. Sedangkan dalam kasus penggembokan gedung DPRD dipicu oleh laporan direktur WALHI terkait rapat dihari sebelumnya yang secara eksplisit mendorong reklamasi Teluk Benoa tetap dilakukan. Alasan yang menjadi titik tolak terbitnya teks sebagai hasil produksi disajikan atas urgensi nilai berita terkait perilaku pemerintah terhadap gerakan masyarakat sipil. Penggunaan bahasa dengan balutan nuansa konflik, akan menjadikan isu ini menarik untuk dikonsumsi oleh publik.

*Aspek institusi* dalam kedua artikel terbitan ForBALI.org sangat kental ialah dikotomi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Dalam kedua berita serta analisis diatas sangat jelas bagaimana keberpihakan media digital ForBALI dalam mewacanakan kasus ini. Kritik terhadap pemerintah oleh aliansi masyarakat ForBali memperlihatkan kekecewaan atas kinerja pemangku kebijakan dari tataran lokal hingga pusat yang nampak mengabaikan aspirasi publik. Nuansa oposisi antara pemerintah dan masyarakat kontra reklamasi terus direproduksi pada artikel tersebut. Ruang negosiasi yang diperjuangkan oleh masyarakat dirasa tidak mumpuni sehingga demokrasi bersifat semu. Kondisi ini terefleksikan dalam rencana pembangunan reklamasi yang dianggap pro investor dan mengesampingkan kepentingan masyarakat lokal. Spirit perjuangan ini tidak lain merupakan bentuk trauma atas bagaimana iklim pariwisata Bali yang dikembangkan semakin lama justru mengeksploitasi serta memarginalkan masyarakat Bali. Padahal sesungguhnya konsep pembangunan Indonesia haruslah mengedepankan kepentingan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan menjadi hal krusial (Suryadana, 2013).

*Aspek tingkat sosial* meliputi tujuan atas produksi teks tersebut. Ketika kita telah memahami kompleksitas permasalahan konflik antara masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan reklamasi Teluk Benoa, dua artikel tersebut nampak memiliki tujuan serupa. Spirit emansipatoris mereka coba untuk hadirkan guna menarik pembaca agar bersikap kritis terhadap rencana reklamasi di wilayah konservasi. Pemaparan alasan visi misi penolakan terdapat secara gamblang dipaparkan dalam web tersebut. Pembahasan penolakan reklamasi secara holistis dalam laman ForBALI.org tanpa pemasangan iklan sesungguhnya wujud pertarungan wacana. Pertarungan wacana ini memiliki tujuan bagi ForBALI untuk mendelegitimasi kekuasaan pemerintah pemangku kebijakan yang dirasa tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam ruang negosiasi yang memadai. Dengan kata lain, permasalahan pembangunan telah biasa melahirkan pro kontra ditengah masyarakat termasuk citra buruk pemerintah sebagai oligarki bersama pemodal, misalnya kasus Reklamasi Teluk Jakarta, Pembangunan Bandara NYIA di Kulon Progo, Pembangunan Pabrik Semen di Pati dan sebagainya. Perebutan kekuasaan semakin kental terasa ketika laman ini juga sama sekali tidak memberikan ruang klarifikasi bagi kaum pro reklamasi, termasuk tidak tersedianya kolom komentar di setiap artikel pemberitaan.

**Kesimpulan**

 Produksi teks di dua artikel ForBALI.org menghadirkan wacana konflik antara masyarakat kontra reklamasi dan pemerintah sebagai penopang kebijakan sebagai oligarki. Melalui analisis wacana kritis dengan mengelaborasi teks dengan tiga konsep utama Norman, maka dapat dikatakan bahwa dua artikel tersebut dilatarbelakangi oleh kejadian spesifik yang memiliki interseksi dengan upaya perjuangan mereka melawan reklamasi Teluk Benoa. Melalui kajian fungsi teks, produksi teks dan kajian aspek praktik sosial budaya sebagai tahap akhir penulis berupaya membongkar relasi kekuasaan secara implisit dalam teks artikel tersebut. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa dua artikel yang termuat dalam laman ForBALI menggunakan bahasa melalui pengembangan wacana serta strategi penyajian guna mendapatkan simpati masyarakat dan menyebarkan spirit perjuangan mereka dalam upaya menolak reklamasi Teluk Benoa.

Menghadirkan wacana secara berkala serta memberitakan setiap kasus secara rinci beserta analisis dimensi kritis masyarakat kontra wacana sebagai narasumber menjadi poin penting dalam menggaet simpati konsumen teks. Apalagi narasumber dalam teks seringkali memiliki legitimasi kuat karena posisi strategis di masyarakat. Misalnya Gendo sebagai kordinator ForBALI, pemuda Sidan sebagai korban serta Direktur WALHI. Posisi ini diperkuat dengan tidak adanya ruang klarifikasi dari pihak oposisi yang menjadikan media ini memiliki ideologi tunggal dalam wacana reklamasi Teluk Benoa. Kompleksitas ini akhirnya bermuara pada perebutan kekuasaan atas ruang negosiasi guna melibatkan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan melalui produksi wacana yang berusaha mendelegitimasi posisi pemerintah dalam mendukung reklamasi Teluk Benoa.

# Daftar Pustaka

Suryadana, L. (2013). *Sosiologi Pariwisata.* Bandung: Humaniora.

ForBALI. (2013). *Mengapa Kami Menolak*. Retrieved from ForBali.org: https://www.forbali.org/id/mengapa-kami-menolak/

Arcana, P. F. (2007). *Surat Merah Untuk Bali.* Yogyakarta: Galang Press.

Jones, S. (2015). *Sisi Gelap Demokrasi.* Jakarta: PUSAD Paramadina.

ForBALI. (2019, April). *Marah! ForBALI Kunci Balik Gedung DPRD Bali*. Retrieved from https://www.forbali.org/id/marah-forbali-kunci-balik-gedung-dprd-bali/

ForBALI.org. (2019, Juni). *Jokowi Datang Baliho BTR Dilepas Paksa*. Retrieved from https://www.forbali.org/id/jokowi-datang-baliho-btr-dilepas-paksa/

Munfarida, E. (2014). Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Norman Fairclough. *Ejournal IAIN Purwokerto*, diakses pada 14 September 2019. http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/komunika/article/view/746.

Darma, A. Y. (2014). *Analisis Wacana Kritis Dalam Multiperspektif.* Bandung: PT. Refika Aditama.

Badara, A. (2012). *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya Pada Wacana Media.* Jakarta: Kencana.

Anas, A., & Fitriawan, R. A. (2018). Media dan Kekerasan: Analisis Norman Fairclough Terhadap Pemberitaan Tarung Gladiator. *Jurnal Sospol, 4*, 37-54.